

**TAHUN
2024**

RENCANA KERJA PERUBAHAN SEKRETARIAT DPRD TA 2024



**SEKRETARIAT
DPRD
KAB. KEP SELAYAR**

Jl. Jend Ahmad Yani No. 1, Benteng
Telp. (0414) 21714 No. Faks. (0414) 21097
Kab. Kepulauan Selayar 92812

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkenan-NYA sehingga Rencana Kerja Sekretariat Rencana Kerja diharapkan mampu untuk memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berjalan. Sekiranya dalam penyusunan Renja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar TA 2024 terdapat kekurangan, maka dari itu diharapkan kritik dan saran dalam penyempurnaan Renja Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar TA berikutnya.

Benteng, 2 Agustus 2024

Sekretaris DPRD

Kab. Kepulauan Selayar,



MASDAR J PRATAMA, S.Kom,MM

Pangkat Pembina /IV.a

NIP. 198406022010011012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2019	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Sekretariat	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	23
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	26
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	28
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	45
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	45
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	46
3.3. Program dan Kegiatan	47
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	64
BAB IV PENUTUP	68
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Tabel : T-C 29 Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 Kabupaten Kepulauan.....	10
Tabel 2.2 Tabel T – C 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kab. Kepulauan Selayar	24
Tabel 2.3 Target Dan Realisasi Sasaran Kinerja Tahun 2022.....	24
Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Sekretariat DPRD Kab. Kepulauan Selayar.....	29
Tabel 3.1 Tujuan sasaran dan indikator dan target kinerja sekretariat DPRD TA 2024.....	47
Tabel 3.2 Tabel T-C 33 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Kepulauan Selayar Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng Sekretariat DPRD	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1. Pengertian Renja Perangkat Daerah

Pembangunan Daerah dimulai dari proses perencanaan yakni rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana pembangunan Daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Perangkat Daerah terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan bersifat tahunan yang berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dan pada skala Pembangunan Daerah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

1.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

1. Persiapan Penyusunan: Persiapan penyusunan renja meliputi: (a) Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah (b) Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah (c) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan (d) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPDRencana Kerja pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berjalan;
2. Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah mencakup: (a) Analisis gambaran pelayanan

2

Perangkat Daerah dan (b) Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;

3. Penyusunan Rancangan Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah dan sudah harus selaras dengan Rancangan Akhir RKPD;
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah dilakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah;
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD;
6. Penetapan Renja Perangkat Daerah yang menjadi dokumen perencanaan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024

memperhatikan program prioritas dan mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar TA 2024 yang isinya telah dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Visi dan Misi Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar. Renja Sekretariat DPRD ikut berpartisipasi dalam mendukung misi pertama Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar yakni **“Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan”** sesuai dengan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur pelayanan terhadap Anggota DPRD. Selain itu, Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis Perubahan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026.

1.2 Landasan Hukum

Dalam menyusun Rancangan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2023 berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta Landasan operasional antara lain Perundang-Undangan yang berlaku yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun

2021-2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai dokumen perencanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 tahun kedepan yang ditetapkan untuk memberi arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh komponen program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD;
2. Sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan Peran fungsi Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
2. Untuk mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektifitas perencanaan dan alokasi anggaran;
3. Agar seluruh program dan kegiatan yang tersusun tepat sasaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2022

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas

dan Fungsi Sekretariat DPRD

2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD

Bab III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD

Tujuan dari evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja yakni menilai tingkat keberhasilan kinerja dan melihat faktor-faktor yang menjadi kekurangan ataupun kelebihan dalam pelaksanaannya sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan Tahun Anggaran berikutnya. Tolak ukur dari penilaian kinerja dalam pelaksanaan evaluasi adalah tingkat pencapaian tujuan dan sasaran. .

Berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021 – 2026, Sekretariat DPRD memiliki empat fungsi yang meliputi: Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dari tugas dan fungsi diatas, maka ditetapkan tujuan Sekretariat DPRD sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis 2021 s/d 2026 adalah Mewujudkan Reformasi birokrasi Sekretariat DPRD, kemudian dari tujuan diatas maka ditetapkanlah sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pengelolaan keuangan sekretariat DPRD
2. Meningkatnya dukungan layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan perda, Fungsi Anggaran dan Fungsi pengawasan

Untuk mewujudkan sasaran diatas pada tahun 2022 telah dilaksanakan 2 program dan 17 kegiatan berdasarkan Permendagri 90 tahun 2019 dan kepmendagri No.050-3708 tahun 2020.

Dana yang tersedia pada Seckretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar setiap tahun dianggarkan dari APBD Kabupaten Kepulauan Selayar yang dialokasikan melalui DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan jumlah dana dalam APBD Tahun 2022 setelah perubahan sebesar Rp. 35.790.369.720,00,- yang terdiri dari :

Setelah Perubahan

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Belanja Operasi | Rp. 35.355.073.220,00 |
| 2. Belanja Modal | Rp. 435.296.500,00 |

Realisasi anggaran sebesar Rp 35.289.519.173 atau 98,6%, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 500.850.547,00 atau 1,4%.

Evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD tahun 2022 dapat dilihat pada tabel TC-29 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tabel : T-C 29
Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022
Kabupaten Kepulauan Selayar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
	Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase Keterpenuhan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja								
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan (Renstra, Renja)	5 Dok	3 dok	3 dok	3 dok	100%	5 Dok	11 dok	220%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	1 Dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 Dok	3	300%

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	1 Dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 Dok	3	300%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA	1 Dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 Dok	3	300%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	1 Dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 Dok	3	300%
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (LPPD, LKPJ)	6 Lap	6 dok	6 dok	6 dok	100%	6 Lap	18	300%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lakip	1 Lap	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 Lap	3	300%
		Aplikasi E-Survey dan SIPEJABAT		2 Aplikasi	2 Aplikasi	2 Aplikasi	100%		4	
	Admnistrasi keuangan perangkat daerah	Persentase Keterpenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan								
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Pencairan Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	12 dok	12 dok	12 dok	100%	26 Orang/bulan	50	192%
	Penyediaan Adminisrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	5 Dok	7	140%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pegujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dok	12 dok	12 dok	12 dok	100%	12 Dok	36	300%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Akuntansi	12 Dok	12 dok	12 dok	12 dok	100%	12 Dok	36	300%

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Lap	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 Lap	3	300%
	Pegelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Tindak Lanjut Bahan Pemeriksaan	1 Dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 Dok	3	300%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester SKPD	Jumlah Dokumen RFK	12 Lap	12 dok	12 dok	12 dok	100%	12 Lap	36	300%
	Admnistrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Dokumen Barang Milik Daerah								
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen RKB	2 Dok	2 dok	2 dok	2 dok	100%	2 Dok	6	300%
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	12 Lap	12 dok	12 dok	12 dok	100%	12 Lap	36	300%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Lap	12 dok	12 dok	12 dok	100%	1 Lap	25	2500%
	Admnistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Pegawai Perangkat Daerah								
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kinerja Pegawai	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	100%	12 dok	36	300%

	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat berdasarkan tugas dan fungsi	10 Orang	-	10 orang	10 orang	100%		10	100%
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan Perundang-Undangan		16 orang	-	-	0%		16	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	26 orang	26 orang	26 orang	28 Orang	108%	26 orang	80	308%
	Admnistrasi Umum Perangkat daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum							0	
	Penyediaan Komponen Instalasi / Penerangan Bangunan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang tersedia	20 Paket	20 jenis	20 jenis	20 jenis	100%	20 Paket	60	300%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	-	3 buah	2 buah	2 buah	150%		5	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan Logistik Kantor	200 Paket	206 buah	200 buah	200 buah	103%		406	203%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bahan Cetak : Baliho/Spanduk	40 Paker	53 lembar	53 lembar	53 lembar	100%	40 Paker	146	365%
		Jumlah Cetak Fotocopy		30.002 lembar	30.000 lembar	30.000 lembar	100%		60002	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang difasilitasi	12 Lap	562 orang	500 orang	500 orang	112%	12 Lap	1074	8950%

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Lap	36 kali	36 kali	36 kali	100%	36 Lap	108	300%
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dok						0	0%
	Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Keterpenuhan Sarana dan Prasarana Kerja							0	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Meubilier		3 unit					3	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan kantor		13 unit	13 unit	13 unit	100%	13 Unit	39	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	35 Unit		35 Unit	35 Unit	100%		35	100%
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Keterpenuhan Jasa Urusan Pemerintahan							0	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat	12 Lap	550 lembar	500 lembar	500 lembar	100%	12 Lap	1062	8850%
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Resi Listrik, Telpn yang dibayaRKAn	12 Lap	57 resi	36 resi	36 resi	100%	12 Lap	105	875%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Layanan Umum Kantor	12 Lap	90	60 jasa	60 jasa	100%	12 Lap	162	1350%
	Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang pemerintah daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik							0	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Atau Kendaraan Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara	4 unit	6	4 unit	4 unit	150%	4 unit	14	350%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara	37 unit	36 unit	36 unit	36 unit	100%	37 unit	109	295%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang terpelihara	35 unit	32	30 unit	30 unit	100%	35 unit	97	277%
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung dan Bangunan Kantor lain dipelihara dan direhabilitasi per tahun	6 unit	6	6 unit	6 unit	100%	6 unit	18	300%
	Layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	Persentase Keterpenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD							0	
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan DPRD	25 Orang/bulan	12 dok	12 dok	12 dok	100%	25 Orang/bulan	49	196%
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Jenis Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	100 Paket	125 set	125 set	125 set	100%	100 Paket	350	350%
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Anggota DPRD melakukan medical checkup	25 orang		25 orang	25 orang	100%		25	100%
	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Keterpenuhan Layanan Administrasi DPRD							0	
	Penyelenggaraan Admnistrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Layanan dalam Penyelenggaraan	12 Dok	5 kali	5 kali	5 kali	100%		10	83%

		Administrasi DPRD								
	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Layanan dalam Fasilitasi Rapat Fraksi DPRD	12 Lap	6 kali	6 kali	6 kali	100%	12 Lap	24	200%
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	8 Lap	6 kali	6 kali	6 kali	100%	8 Lap	20	250%
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Program Kerja DPRD Tersusun dan Terintegrasi Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) dan dokumen penganggaran setwan							0	
		Rata-rata Persentase Keterpenuhan Layanan Terhadap Pelaksanaan Tugas Anggota DPRD dalam Fungsi Pengawasan, Penganggaran dan Pembentukan Perda							0	
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Cakupan Layanan dalam Pembahasan Perda (%)							0	
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Layanan Kunker,	5 Dok	5 kali	5 kali	5 kali	100%	5 Dok	15	
		Jumlah Layanan Rapat		3 kali	3 kali	3 kali	100%		6	

	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Layanan Kunker,	30 Dok	26 kali	15 Kali	16 Kali	107%	30 Dok	72	240%
		Jumlah Layanan Rapat		27 kali	18 Kali	18 Kali	100%		45	
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Naskah Akademik	3 Dok	0				3 Dok	3	100%
	Pembahasan kebijakan anggaran	Persentase Rapat Pembahasan yang terselenggara terhadap rapat yang terjadwal							0	
	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Layanan Rapat dalam Pembahasan KUA PPAS	10 Dok	10	10	10	100%	10 Dok	30	300%
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Layanan Rapat dalam Pembahasan KUA PPAS Perubahan	10 Dok	10	10	10	100%	10 Dok	30	300%
	Pembahasan APBD	Jumlah Layanan Konsultasi/Evaluasi Pembahasan APBD	11 Dok	1	1	1	100%	11 Dok	13	118%
		Jumlah Layanan Rapat Pembahasan APBD		12	12	12	100%		24	
	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Layanan Konsultasi/Evaluasi	11 Dok	1	1	1	100%	11 Dok	13	118%
		Jumlah Layanan Rapat		12	12	12	100%		24	
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Layanan Konsultasi/Evaluasi	10 dok	1	1	1	100%	10 dok	12	120%
		Jumlah Layanan Rapat		12	12	12	100%		24	
	Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan	Rata-Rata Persentase Rapat dan Kunjungan							0	

		Kerja yang teselenggara terhadap rapat yang terjadwal								
	Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan hukum	Jumlah Layanan Kunjungan Kerja	15 Lap	9 kali	5 kali	5 kali	100%	15 Lap	29	193%
		Jumlah Layanan Rapat		8 kali	10 kali	10 kali	100%		18	
	Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Insfrakstruktur	Jumlah Layanan Kunjungan Kerja	15 Lap	8 kali	5 kali	5 kali	100%	15 Lap	28	187%
		Jumlah Layanan Rapat		7 kali	10 kali	10 kali	100%		17	
	Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Layanan Kunjungan Kerja	15 Lap	8 kali	5 kali	5 kali	100%	15 Lap	28	187%
		Jumlah Layanan Rapat		6 kali	10 kali	10 kali	100%		16	
	Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Layanan Kunjungan Kerja	15 Lap	2 kali	5 kali	5 kali	100%	15 Lap	22	147%
		Jumlah Layanan Rapat			10 kali	10 kali	100%		10	
	Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Layanan Kunjungan Kerja	15 Lap	2 kali	5 kali	7 kali	140%	15 Lap	24	160%
		Jumlah Layanan Rapat			10 kali	10 kali	100%		10	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh BPK	Jumlah Layanan Kunjungan Kerja	5 Dok	4 kali	5 kali	6 kali	120%	5 Dok	15	300%
		Jumlah Layanan Rapat		-	10 kali	11 kali	110%		11	

	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Layanan Kunjungan Kerja	5 Dok	4 kali	10 kali	10 kali	100%	5 Dok	19	380%
		Jumlah Layanan Rapat	-	-	-	-	100%	-	0	
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Layanan Kunjungan Kerja	5 Dok	3	5 Kali	5 Kali	100%	5 Dok	13	260%
		Jumlah Layanan Rapat							0	
	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Keterpenuhan Layanan Peningkatan Kapasitas lembaga DPRD							0	
	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	25 Dok						0	0%
	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah pelaksanaan Pendalaman Tugas DPRD/BIMTEK anggota DPRD	78 Dok	3 kali	78 orang	78 orang	100%	78 Dok	159	204%
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Layanan dalam Publikasi dan Dokumentasi Dewan	60 Dok	60 jasa	60 jasa	60 jasa	100%	60 Dok	180	300%
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Kelompok Pakar	21 orang	21 orang/per da	21 orang/perda	21 orang/perda	100%	21 orang	63	300%
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	100%	60 orang	180	300%
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah pelaksanaan sosialisasi	75 Dok	-	3 kali	3 kali	100%		3	4%
	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Layanan Rapat Intern	1 Dok	1 kali	2 kali	2 kali	100%		3	300%

	Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	Cakupan Layanan dalam penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat (%)							0	
	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Layanan Dalam Pelaksanaan kunker	75 Lap	75 Kali	75 Kali	75 Kali	100%	75 Lap	225	300%
	Penyusunan PokokPokok Pikiran DPRD	Jumlah dokumen pokok-pokok pikiran	1 Dok	-	2 dok	2 dok	100%		2	200%
	Pelaksanaan Reses	Jumlah Layanan dalam Pelaksanaan Reses	75 Dok	75 Kali	75 Kali	75 Kali	100%	75 Dok	225	300%
	Pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	Cakupan Layanan dalam Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik								
	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Layanan dalam rapat Intern	-	2 kali	-			-	2	
		Jumlah Layanan Perjalanan Dinas		2 kali	-				2	
	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Layanan dalam Rapat Intern	5 kLap	3 kali	5 kali	5 kali	100%	5 Lap	13 kali	260%
	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Keterpenuhan Layanan Terhadap Tugas DPRD								
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Layanan Rapat Koordinasi	33 Dok	34 kali	45 kali	45 kali	100%	33 Dok	112	339%
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Dok Laporan Kinerja	1 Lap	-	1 dok					
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Layanan Perjalanan Dinas DPRD	10 Dok	2 kali	1 kali	1 kali	100%	10 Dok	13	130%
		Jumlah Layanan Rapat Badan Musyawarah		11 kali	24 kali	24 kali	100%		35	

	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Koordinasi Konsultasi Pimpinan DPRD	50 kali	71 kali	50 kali	50 kali	100%	50 kali	171	342%
--	--------------------------------	--	---------	---------	---------	---------	------	---------	-----	------

Berdasarkan table diatas dapat dikemukakan bahwa kinerja rata-rata sub kegiatan/kegiatan Sekretariat DPRD mencapai 100%, hanya terdapat satu realisasi sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada TA 2022 yakni pada sub kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD dikarenakan kurangnya Sumber Daya dalam menyusun Laporan Kinerja DPRD.

Selain pada sub kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD, sub kegiatan lain telah memenuhi target yang telah direncanakan. Pencapaian target realisasi tersebut di dukung oleh kerja sama dan komitmen yang terjalin pada seluruh staf bagian umum dalam menyiapkan fasilitas sarana dan prasarana yang diperlukan pada saat penyelenggaraan rapat dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Kebijakan-kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu dilakukan untuk mengatasi factor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Memenuhi formasi kebutuhan Sumber Daya Apratur agar dapat meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD dalam menunjang kegiatan Anggota DPRD.
- b. Melakukan koordinasi secara intensif dengan pihak ke tiga dalam mendukung pelaksanaan tiga fungsi DPRD (fungsi Anggaran,Pengawasan dan Legislasi)
- c. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD khususnya dalam hal penguasaan teknologi dan informasi selaras dengan semakin tingginya kebutuhan terkait perkembangan teknologi.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas persetujuan DPRD dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretaris DPRD dibantu oleh pejabat struktural eselon III, yaitu Kepala Bagian, dan eselon IV yaitu Kepala Sub Bagian, dan Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, “Sektetariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan

pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD”. Dalam menyelenggarakan tugas Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:

- Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

Capaian kinerja organisasi Sekretariat DPRD diukur mengacu pada indikator kinerja dari sasaran yang terdiri dari input, output dan outcome. Indikator kinerja beserta target sasaran dan program DPRD tertuang dalam perjanjian kinerja sekretariat TA 2022, berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan tujuan organisasi. Keberhasilan sasaran yang didukung oleh program dan kegiatan dilakukan melalui pengukuran keberhasilan setiap indikator dengan membandingkan target dengan realisasi.

Keberhasilan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kab Kepulauan Selayar dapat dilihat pada Tabel 2.2 (Tabel.T-C.30) berikut ini :

Tabel 2.2
Tabel T – C 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD
Kab. Kepulauan Selayar

No	Indikator	SPM/ Standar Nasiona 1	IK K	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai Sakip SKPD			B(60)	B(65)	BB(70)	BB(75)	CC (58,33)	B (61,35)	BB(70)	BB(75)	
2	Laporan Keuangan yang sesuai SAP			Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	
3	Indeks Kepuasan DPRD			65	70	75	80	77	80	75	80	
4	Persentase pelaksanaan program kerja DPRD tepat waktu			100	100	100	100	100	100	100	100	

Sumber : Renstra Tahun 2021-2026 dan LAKIP Sekretariat DPRD TA 2022

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam matrik perbandingan antara target dan realisasi kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.3
Target Dan Realisasi Sasaran Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	REALISASI	TKT CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP SKPD	B(60)	C (58,33)	C (58,33)	RENDAH
2	Meningkatnya pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD	Laporan Keuangan yang sesuai SAP	Sesuai	Sesuai	100%	SANGAT TINGGI
3	Meningkatnya dukungan layanan dan fasilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan perda, Fungsi Anggaran dan fungsi pengawasan	Persentase pelaksanaan program kerja DPRD tepat waktu	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI
		Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat	65	77	118%	SANGAT TINGGI

Sumber : LAKIP Sekretariat DPRD TA 2022

Realisasi Kinerja sasaran dan indikator kinerja untuk tahun 2022 telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni tahun 2021 dan terus berupaya dalam perbaikan kinerja.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, *“Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD”*. Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya perlu untuk menyeimbangkan antara tanggung jawab administratif kepada Kepala Daerah dan tanggung jawab operasional kepada Anggota DPRD. Sebagai lembaga birokrasi, Sekretariat DPRD dalam memberikan pelayanan kepada DPRD dituntut untuk tidak terlibat dalam politik praktis dan harus memiliki mentalitas kuat dan kemampuan untuk mengakomodir kepentingan dalam mendukung kinerja DPRD. Pada proses pelaksanaan tugas dan fungsi, Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Sehingga diperlukan kemampuan untuk mengenali serta merespon isu-isu penting dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat.

Adapun hal-hal yang menjadi isu-isu strategis di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar :

1. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur dalam meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD;
2. Benturan kepentingan yang seringkali terjadi menuntut mentalitas yang kuat dalam mengakomodir berbagai kepentingan semua pihak;
3. Kesadaran akan tanggung jawab dan disiplin kerja aparat masih rendah, terdapat beberapa aparat yang masih lalai terhadap tanggung jawabnya dan memberikan beban kerja kepada pihak lain;

Dengan memperhatikan langkah strategis maka dapat ditetapkan beberapa upaya untuk mencapai keberhasilan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya;
2. Menjalin komunikasi intensif dan baik diantara partai, dengan fraksi-fraksi yang ada dan pada semua pihak yang terkait terkait berbagai regulasi atau kebijakan yang akan ataupun sedang berjalan;
3. Memenuhi kebutuhan formasi Sumber Daya Aparatur yang kurang.

Dari uraian isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sangatlah berpengaruh terhadap dampak pencapaian visi, misi Pemerintah Kabupaten Kabupaten Kepulauan Selayar.

Menurut Analisis SWOT adalah sebagai berikut :

Kekuatan (Strength) :

- a. Tersedianya anggaran operasional yang cukup memadai.
- b. Tersedianya Tata Tertib dan Kode Etik DPRD berdasarkan Peraturan DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.
- c. Terjalinnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD.
- d. Kedudukan Sekretariat DPRD yang lebih fungsional dengan ditetapkannya UU No. 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Kelemahan (Weakness):

- a. Kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD yang belum optimal
- b. Kurangnya disiplin dan motivasi kerja aparatur
- c. Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

- d. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia

Peluang (Opportunity) :

- a. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD.
- b. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis
- c. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti dengan peningkatan aksesibilitasnya.
- d. Dimungkinkannya pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD

Tantangan (Threat):

- a. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan.
- b. Seringnya terjadi perubahan kebijakan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah
- c. Masih banyaknya hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat.

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah rekomendasi isu-isu pelayanan teknis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yakni

1. Mengoptimalkan sistem pelayanan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar ;
2. Merekomendasikan kepada BKD agar menempatkan pegawai ASN di lingkup Sekretariat DPRD sesuai dengan bidang pendidikan .
3. Memberdayakan tenaga pelayanan dan menyediakan tenaga teknis di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui kegiatan Bimtek Legal Drafting/ Diklat- Diklat;
4. Mewujudkan prasarana dan sarana kerja yang dibutuhkan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (lengkap dengan fasilitas dan referensi-

referensi atau bahan penyusunan).

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD yang terdapat dalam Renstra Sekretariat DPRD 2021-2026 , terdapat beberapa usulan kegiatan yang berubah. Hal ini disebabkan karena adanya analisis kebutuhan yang berbeda pada tahun sebelumnya, regulasi terbaru dan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.

Tabel 2.4

Tabel T-C31

Review terhadap Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2024

Sekretariat DPRD Kab. Kepulauan Selayar

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rata-rata persentase keterpenuhan capaian kinerja dan keuangan	100 %	16.766.021.500	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rata-rata persentase keterpenuhan capaian kinerja dan keuangan	100 %	17.075.322.700	
			Persentase keterpenuhan sarana dan prasarana Aparatur yang memadai	100 %				Persentase keterpenuhan sarana dan prasarana Aparatur yang memadai	100 %		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase keterpenuhan Dokumen perencanaan dan Laporan kinerja	100%	80.599.600	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase keterpenuhan Dokumen perencanaan dan Laporan kinerja	100%	80.599.600	
	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	5 Dok	22.349.600	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	5 Dok	22.349.600	
	Koordinasi dan	Kab.	Jumlah Dokumen RKA-	1 Dok	9.710.000	Koordinasi dan	Kab.	Jumlah Dokumen RKA-	1 Dok	9.710.000	

	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	7.480.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	7.480.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	4.030.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	4.030.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	4.030.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	4.030.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Lap	18.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Lap	18.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Lap	15.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Lap	15.000.000	

	Administrasi Keuangan Perangkat daerah		Persentase keterpenuhan Dokumen pelaporan keuangan	100%	2.500.368.500	Administrasi Keuangan Perangkat daerah		Persentase keterpenuhan Dokumen pelaporan keuangan	100%	2.354.425.300	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah ASN yang memperoleh gaji dan tunjangan	26 Orang/bulan	2.393.504.200	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah ASN yang memperoleh gaji dan tunjangan	26 Orang/bulan	2.244.100.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dok	41.866.300	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dok	38.152.300	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dok	24.600.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dok	31.138.200	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	8.400.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	8.400.000	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dok	16.998.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dok	16.998.000	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Lap	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Lap	15.636.800	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Keterpenuhan Dokumen Admnistrasi Barang Milik Daerah	100%	10.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Keterpenuhan Dokumen Admnistrasi Barang Milik Daerah	100%	10.000.000	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dok	3.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dok	3.000.000	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Lap	2.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Lap	2.000.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Lap	5.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Lap	5.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase keterpenuhan adaminstrasi pegawai perangkat daerah	100 %	296.484.200	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase keterpenuhan adaminstrasi pegawai perangkat daerah	100 %	383.809.200	

	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	296.484.200	296.484.200	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	29 orang	383.809.200	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase keterpenuhan administrasi umum	539.500.000	539.500.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase keterpenuhan administrasi umum	100 %	650.909.300	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15.310.000	15.310.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	15.310.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	34.000.000	34.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	40 Paket	46.010.300	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.190.000	40.190.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Lap	40.190.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Lap	450.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Lap	549.399.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase keterpenuhan sarana dan prasarana kerja	100 %	49.282.200	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase keterpenuhan sarana dan prasarana kerja	100 %	287.338.700	
						Pengadaan Mebel	Kab.		17 Unit	170.056.500	

							Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng				
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Peralatan dan mesin yang tersedia	6 Unit	49.282.200	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Peralatan dan mesin yang tersedia	6 Unit	117.282.200	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Keterpenuhan Jasa Urusan Pemerintahan	100 %	641.401.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Keterpenuhan Jasa Urusan Pemerintahan	100 %	772.833.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Lap	10.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Lap	10.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	304.578.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	329.610.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	326.823.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	433.223.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100 %	595.748.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100 %	666.138.000	
	Penyediaan Jasa	Kab.	Jumlah Kendaraan	4 Unit	183.264.000	Penyediaan Jasa	Kab.	Jumlah Kendaraan	4 Unit	183.264.000	

	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	PerOrangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	PerOrangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 unit	82.022.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 unit	115.652.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 unit	20.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 unit	27.310.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	310.462.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	339.912.000	
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Persentase Keterpenuhihan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 %	11.105.167.200	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Persentase Keterpenuhihan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 %	11.040.953.300	
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	25 Orang/bulan	10.031.171.000	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	25 Orang/bulan	9.876.957.100	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut	Kab. Kepulauan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut	125 Paket	1.073.996.200	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kab. Kepulauan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut	125 Paket	1.163.996.200	

	DPRD	Selayar, Benteng, Benteng	DPRD yang Disediakan				Selayar, Benteng, Benteng	DPRD yang Disediakan			
	Pelaksanaan <i>Medical Check Up</i> DPRD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD			Pelaksanaan <i>Medical Check Up</i> DPRD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD			
	Layanan Administrasi DPRD		Persentase Keterpenuhan Layanan Administrasi DPRD	100 %	947.470.800	Layanan Administrasi DPRD		Persentase Keterpenuhan Layanan Administrasi DPRD	100 %	828.316.300	
	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	12 Dok	49.470.800	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	12 Dok	72.045.800	
	Fasilitasi Fraksi DPRD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD			Fasilitasi Fraksi DPRD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD		5.025.000	
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	8 Lap	10.000.000	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	8 Lap	11.245.500	
				8 Paket	888.000.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Persentase keterpenuhan kebutuhan rumah tangga DPRD	8 Paket	740.000.000	
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN		Persentase Program Kerja DPRD yang Terintegrasi dengan	100%	10.792.693.700	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		Persentase Program Kerja DPRD yang Terintegrasi dengan	100%	12.681.103.300	

	TUGAS DAN FUNGSI DPRD		Program RPJMD dan RKPD (%)					Program RPJMD dan RKPD (%)			
			Rata rata persentase keterpenuhan layanan terhadap pelaksanaan tugas anggota DPRD dalam fungsi Pengawasan, penganggaran dan pembentukan perda	100%				Rata rata persentase keterpenuhan layanan terhadap pelaksanaan tugas anggota DPRD dalam fungsi Pengawasan, penganggaran dan pembentukan perda	100%		
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Cakupan layanan dalam pembahasan perda (%)	100%	1.668.845.000	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Cakupan layanan dalam pembahasan perda (%)	100%	2.535.657.000	
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5 Dok	135.565.000	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5 Dok	122.155.000	
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	30 Dok	1.533.280.000	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	30 Dok	2.413.502.000	
	Pembahasan Kebijakan Anggaran		Cakupan layanan dalam pembahasan kebijakan anggaran (%)	100%	692.861.700	Pembahasan Kebijakan Anggaran		Cakupan layanan dalam pembahasan kebijakan anggaran (%)	100%	677.993.000	

	Pembahasan KUA dan PPAS	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	10 Dok	25.000.300	Pembahasan KUA dan PPAS	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	10 Dok	25.000.300	
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	10 Dok	24.997.200	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	10 Dok	14.986.200	
	Pembahasan APBD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	11 Dok	214.287.800	Pembahasan APBD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	11 Dok	248.256.800	
	Pembahasan APBD Perubahan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	11 Dok	214.287.800	Pembahasan APBD Perubahan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	11 Dok	208.624.200	
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	10 Dok	214.288.600	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	10 Dok	181.125.500	
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Cakupan layanan dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (%)	100%	599.781.300	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Cakupan layanan dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (%)	100%	553.231.400	

	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	15 Lap	137.285.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	15 Lap	140.145.700	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	15 Lap	123.620.300	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	15 Lap	166.095.400	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	15 Lap	129.095.600	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	15 Lap	66.550.600	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	15 Lap	61.000.400	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	15 Lap	58.351.700	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	15 Lap	75.000.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	15 Lap	74.998.900	

	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	5 Dok	59.000.000	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	5 Dok	32.309.100	
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	5 Dok	2.680.000	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	5 Dok	2.680.000	
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	5 Dok	12.100.000	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	5 Dok	12.100.000	
	Peningkatan Kapasitas DPRD		Persentase keterpenuhan layanan peningkatan Kapasitas lembaga DPRD	100%	926.651.900	Peningkatan Kapasitas DPRD		Persentase keterpenuhan layanan peningkatan Kapasitas lembaga DPRD	100%	1.036.512.500	
	Orientasi DPRD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	25 Dok	501.651.900	Orientasi DPRD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	25 Dok	589.512.500	
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	60 Dok	220.000.000	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	60 Dok	217.500.000	
	Penyediaan	Kab.	Jumlah Orang dalam	21	25.000.000	Penyediaan Kelompok	Kab.	Jumlah Orang dalam	21 Orang		

	Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang		Pakar dan Tim Ahli	Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Kelompok Pakar dan Tim Ahli		49.500.000	
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	60 Orang	180.000.000	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	60 Orang	180.000.000	
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Persentase Cakupan Layanan Dalam Hal Penerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100%	1.652.050.000	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Persentase Cakupan Layanan Dalam Hal Penerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100%	1.657.050.000	
	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	75 Lap	222.000.000	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	75 Lap	222.000.000	
	Pelaksanaan Reses	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	50 Dok	1.430.050.000	Pelaksanaan Reses	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	50 Dok	1.435.050.000	
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Persentase Cakupan Layanan Pelaksanaan Rapat Intern BK	100%	66.246.000	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Persentase Cakupan Layanan Pelaksanaan Rapat Intern BK	100%	81.588.000	
	Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	5 Lap	66.246.000	Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	5 Lap	81.588.000	
	Fasilitasi Tugas		Persentase	100%		Fasilitasi Tugas DPRD		Persentase	100%	6.139.071.400	

	DPRD		keterpenuhan layanan terhadap tugas DPRD		5.186.257.800			keterpenuhan layanan terhadap tugas DPRD			
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	33 Dok	3.153.970.000	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	33 Dok	4.224.970.100	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	10 Dok	204.775.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	10 Dok	194.779.000	
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	50 Dok	1.827.512.800	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	50 Dok	1.719.322.300	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Terhadap Kebijakan Nasional

Seiring tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur fasilitasi/pelayanan kepada DPRD yang memiliki peran penting untuk dapat mewujudkan visi, misi tersebut, maka dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 - 2026 merupakan salah satu OPD pelaksana Misi yaitu : **Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan” dengan tujuan RPJMD “Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah”**

Dari Rumusan di atas maka Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar pada Perubahan Rencana strategis Tahun 2021 - 2026 Menetapkan tujuan ” **Mewujudkan Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD ”**

Dengan tujuan tersebut, Sekretariat DPRD diharapkan dapat memberikan fasilitasi terhadap optimalisasi Kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam implementasi Trifungsi DPRD yaitu fungsi pembentukan Peraturan Daerah, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan. Dalam Pembentukan Peraturan Daerah sangat dibutuhkan harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah dalam proses Penetapan produk hukum yang berkualitas dan partisipatif yang mampu mengakomodir kepentingan masyarakat.

Dari uraian diatas dalam mendukung tercapainya kebijakan tersebut kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD sebagai berikut:

- a. Tugas Utama : Meningkatkan Kualitas dan fasilitasi Pelayanan dalam Setiap Kegiatan DPRD

Dengan program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
Rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
2. Pembahasan Kebijakan Anggaran
3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

4. Peningkatan Kapasitas DPRD
 5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
 7. Fasilitasi Tugas DPRD
- b. Tugas Pendukung : Persentase pemenuhan sarana dan prasarana
- Selain dari pada faktor utama, terdapat faktor pendukung dalam menunjang optimalisasi kinerja DPRD terkait sarana dan prasarana yang memadai serta Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD yang terampil, akuntabel dan professional sehingga tugas dan fungsi fasilitasi terhadap 3 fungsi DPRD yakni fungsi anggaran, pengawasan dan legislasi dapat dilaksanakan secara optimal.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

a. Tujuan

Tujuan adalah hasil akhir yang hendak dicapai dalam periode jangka waktu yang telah ditentukan. Sekretariat DPRD sebagai salah-satu SKPD yang memiliki peran dalam mewujudkan visi, misi Kepala Daerah, dalam Rencana Kerja Tahun 2024 menetapkan tujuan yang ingin dicapai yakni sebagai berikut: *Mewujudkan reformasi birokrasi Sekretariat DPRD*

b. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam Renja ini adalah:

1. Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap pelayanan Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya dukungan layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan perda, Fungsi Anggaran dan Fungsi pengawasan.

Demikian pula untuk target dari indikator tujuan dan sasaran Renja sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 juga mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1

Tujuan sasaran, Indikator dan Target Kinerja Sekretariat DPRD TA 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan / sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun 2024
1	2	3	4	5
	Mewujudkan reformasi birokrasi Sekretariat DPRD		Indeks reformasi secretariat DPRD	68,00 (B)
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	BB(70)
			Laporan Keuangan yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	Sesuai
		Meningkatnya dukungan layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan perda, Fungsi Anggaran dan Fungsi pengawasan	Persentase pelaksanaan program kerja DPRD tepat waktu	100
			Tingkat Kualitas Layanan Sekretariat DPRD	75

Sumber : Renstra Perubahan Sekretariat DPRD Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026

3.4 Program dan Kegiatan

Dalam mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar , maka pada tahun 2024 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar merencanakan 2 program dan 17 kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin. Dalam merumuskan Program dan kegiatan tersebut terdapat beberapa pertimbangan pencapaian visi misi kepala daerah, dan peraturan perundang undangan yang setiap saat berubah..

- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA terdiri dari 10 kegiatan, meliputi :
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - i. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
 - j. Layanan Administrasi DPRD
- PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS FUNGSI DPRD terdiri dari 7 kegiatan meliputi :
 - a. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
 - b. Pembahasan Kebijakan Anggaran
 - c. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 - d. Peningkatan Kapasitas DPRD
 - e. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 - f. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
 - g. Fasilitasi Tugas DPRD

Total kebutuhan dana/pagu indikatif Perubahan sebesar Rp. 29.756.426.000, yang semuanya bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Selayar.

Tabel rencana Program dan kegiatan Sekretariat DPRD TA Anggaran 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.2

Tabel T-C 33

Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Dan Perkiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Kepulauan Selayar Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng
Sekretariat DPRD

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian	Kebutuhan Dana
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata persentase keterpenuhan capaian kinerja dan keuangan		100 %	17.075.322.700	Dana Alokasi Umum		100 %	24.331.118.889
						Persentase keterpenuhan sarana dan prasarana Aparatur yang memadai		100 %				100 %	
4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan Dokumen perencanaan dan Laporan kinerja		100%	80.599.600	Dana Alokasi Umum		100%	325.742.901
4	02	01	2.01	01	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Kepulauan Selayar,	5 Dok	22.349.600	Dana Alokasi Umum		5 Dok	62.968.400

							Benteng, Benteng						
4	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	1 Dok	9.710.000	Dana Alokasi Umum		1 Dok	15.400.000
4	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	1 Dok	7.480.000	Dana Alokasi Umum		1 Dok	18.700.000
4	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	1 Dok	4.030.000	Dana Alokasi Umum		1 Dok	8.800.000
4	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	1 Dok	4.030.000	Dana Alokasi Umum		1 Dok	15.400.000
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	12 Lap	18.000.000	Dana Alokasi Umum		12 Lap	94.114.251

4	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	1 Lap	15.000.000	Dana Alokasi Umum		1 Lap	110.360.250
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase keterpenuhan Dokumen pelaporan keuangan		100%	2.354.425.300	Dana Alokasi Umum		100%	2.495.879.948
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang memperoleh gaji dan tunjangan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	26 Orang/bulan	2.244.100.000	Dana Alokasi Umum		26 Orang/bulan	2.266.701.548
4	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng			Dana Alokasi Umum		1 Dok	5.500.000
4	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	12 Dok	38.152.300	Dana Alokasi Umum		12 Dok	68.343.000
4	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	12 Dok	31.138.200	Dana Alokasi Umum		12 Dok	53.779.000
4	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan	Kab.	1 Lap	8.400.000	Dana		1 Lap	13.200.000

					Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng			Alokasi Umum			
4	02	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	1 Dok	16.998.000	Dana Alokasi Umum		1 Dok	50.457.000
4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	12 Lap	15.636.800	Dana Alokasi Umum		12 Lap	37.899.400
4	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah		100%	10.000.000	Dana Alokasi Umum		100%	59.301.000
4	02	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	2 dok	3.000.000	Dana Alokasi Umum		2 dok	5.500.000
4	02	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	8 Lap	2.000.000	Dana Alokasi Umum		8 Lap	42.801.000
4	02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kepulauan Selayar,	4 Lap	5.000.000	Dana Alokasi Umum		4 Lap	11.000.000

							Benteng, Benteng						
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi pegawai perangkat daerah		100 %	383.809.200	Dana Alokasi Umum		100 %	660.935.000
4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan atribut kelengkapannya	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng			Dana Alokasi Umum		27 Paket	23.760.000
4	02	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng			Dana Alokasi Umum		12 dok	30.800.000
4	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng			Dana Alokasi Umum		10 Orang	181.912.500
4	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	29 orang	383.809.200	Dana Alokasi Umum		29 orang	424.462.500
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum		100 %	650.909.300	Dana Alokasi Umum		100 %	

4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	20 Paket	15.310.000	Dana Alokasi Umum		20 Paket	16.841.000
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng			Dana Alokasi Umum		200 Paket	82.500.000
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	40 Paket	46.010.300	Dana Alokasi Umum		40 Paket	53.361.000
4	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	12 Lap	40.190.000	Dana Alokasi Umum		12 Lap	62.150.000
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	36 Lap	549.399.000	Dana Alokasi Umum		36 Lap	622.184.409
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan sarana dan prasarana kerja		100 %	287.338.700	Dana Alokasi Umum		100 %	157.657.500

4	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang tersedia	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	17 Unit	170.056.500	Dana Alokasi Umum		2 Unit	16.500.000
4	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	6 unit	117.282.200	Dana Alokasi Umum		9 unit	126.500.000
4	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	-	0	Dana Alokasi Umum		35 Unit	14.657.500
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Jasa Urusan Pemerintahan		100 %	772.833.000	Dana Alokasi Umum		100 %	619.537.972
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	12 Lap	10.000.000	Dana Alokasi Umum		12 Lap	18.191.250
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	12 Lap	329.610.000	Dana Alokasi Umum		12 Lap	308.757.444
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kepulauan Selayar,	12 Lap	433.223.000	Dana Alokasi Umum		12 Lap	292.589.278

							Benteng, Benteng						
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik		100 %	666.138.000	Dana Alokasi Umum		100 %	523.881.331
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan PerOrangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	4 Unit	183.264.000	Dana Alokasi Umum		4 Unit	201.590.400
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	36 unit	115.652.000	Dana Alokasi Umum		37 unit	99.472.181
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	35 unit	27.310.000	Dana Alokasi Umum		35 unit	30.318.750
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	5 unit	339.912.000	Dana Alokasi Umum		6 unit	192.500.000
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Keterpenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		100 %	11.040.953.300	Dana Alokasi Umum		100 %	17.292.994.400
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng,	25 Orang/bulan	9.876.957.100	Dana Alokasi Umum		25 Orang/bulan	15.674.230.000

							Benteng						
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	125 Paket	1.163.996.200	Dana Alokasi Umum		100 Paket	1.034.708.400
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan <i>Medical Check Up</i> DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng			Dana Alokasi Umum		25 Orang	584.056.000
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Persentase Keterpenuhan Layanan Administrasi DPRD		100 %	947.470.800	Dana Alokasi Umum		100 %	1.358.152.428
4	02	01	2.16	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	12 Dok	72.045.800	Dana Alokasi Umum		12 Dok	55.000.000
4	02	01	2.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng		5.025.000	Dana Alokasi Umum		12 Lap	31.881.300
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	8 Lap	11.245.500	Dana Alokasi Umum		8 Lap	43.671.128
4	02	01	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Persentase keterpenuhan kebutuhan rumah tangga DPRD	Kab. Kepulauan Selayar,	8 Paket	740.000.000	Dana Alokasi Umum		3 Paket	1.227.600.000

							Benteng, Benteng						
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Program Kerja DPRD yang Terintegrasi dengan Program RPJMD dan RKPD (%)		100%	12.681.103.3 00	Dana Alokasi Umum		100%	17.363.544.643
						Rata rata persentase keterpenuhan layanan terhadap pelaksanaan tugas anggota DPRD dalam fungsi Pengawasan, penganggaran dan pembentukan perda		100%				100%	
4	02	02	2.0 1		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Cakupan layanan dalam pembahasan perda (%)			2.535.657.00 0	Dana Alokasi Umum			3.810.950.000
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	5 Dok	122.155.000	Dana Alokasi Umum		5 Dok	397.650.000
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	30 Dok	2.413.502.000	Dana Alokasi Umum		30 Dok	3.193.300.000
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng,		0	Dana Alokasi Umum		3 Dok	220.000.000

						yang Difasilitasi	Benteng						
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Cakupan layanan dalam pembahasan kebijakan anggaran (%)		100%	677.993.000	Dana Alokasi Umum		100%	947.650.000
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	10 Dok	25.000.300	Dana Alokasi Umum		10 Dok	60.637.500
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	10 Dok	14.986.200	Dana Alokasi Umum		10 Dok	60.637.500
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	11 Dok	248.256.800	Dana Alokasi Umum		11 Dok	303.187.500
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	11 Dok	208.624.200	Dana Alokasi Umum		11 Dok	303.187.500
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	10 Dok	181.125.500	Dana Alokasi Umum		10 Dok	220.000.000
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Cakupan layanan dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (%)		100%	553.231.400	Dana Alokasi Umum		100%	1.482.397.155

4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	15 Lap	140.145.700	Dana Alokasi Umum		15 Lap	270.995.052
4	02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	15 Lap	166.095.400	Dana Alokasi Umum		15 Lap	253.404.113
4	02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	15 Lap	66.550.600	Dana Alokasi Umum		15 Lap	242.489.363
4	02	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	15 Lap	58.351.700	Dana Alokasi Umum		15 Lap	253.404.113
4	02	02	2.03	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	15 Lap	74.998.900	Dana Alokasi Umum		15 Lap	228.745.000
4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	5 Dok	32.309.100	Dana Alokasi Umum		5 Dok	205.931.014

4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	5 Dok	2.680.000	Dana Alokasi Umum		5 Dok	10.450.000
4	02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	5 Dok	12.100.000	Dana Alokasi Umum		5 Dok	16.978.500
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase keterpenuhan layanan peningkatan Kapasitas lembaga DPRD		100%	1.036.512.500	Dana Alokasi Umum		100%	2.856.741.588
4	02	02	2.04	01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	25 Dok	589.512.500	Dana Alokasi Umum		25 Dok	460.540.638
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng			Dana Alokasi Umum		75 Dok	1.701.427.750
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	60 Dok	217.500.000	Dana Alokasi Umum		60 Dok	290.400.000
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng,	21 Orang	49.500.000	Dana Alokasi Umum		21 Orang	187.673.200

							Benteng						
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	60 Orang	180.000.000	Dana Alokasi Umum		60 Orang	204.600.000
4	02	0 2	2.0 5		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Cakupan Layanan Dalam Hal Penerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		100%	1.657.050.00 0	Dana Alokasi Umum		100%	2.768.599.900
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	75 Lap	222.000.000	Dana Alokasi Umum		75 Lap	409.099.900
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	50 Dok	1.435.050.000	Dana Alokasi Umum		75 Dok	2.359.500.000
4	02	0 2	2.0 6		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Cakupan Layanan Pelaksanaan Rapat Intern BK		100%	81.588.000	Dana Alokasi Umum		100%	93.500.000
4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	5 Lap	81.588.000	Dana Alokasi Umum		5 Lap	93.500.000
4	02	0 2	2.0 8		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase keterpenuhan layanan terhadap tugas DPRD		100%	6.139.071.40 0	Dana Alokasi Umum		100%	5.403.706.000

4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	33 Dok	4.224.970.100	Dana Alokasi Umum		33 Dok	3.960.000.000
4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	10 Dok	194.779.000	Dana Alokasi Umum		10 Dok	165.000.000
4	02	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	53 Dok	1.719.322.300	Dana Alokasi Umum		50 Dok	1.278.706.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja Perangkat daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan memberikan gambaran terkait program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif akan dijabarkan kedalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Rumusan Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kab. Kepulauan Selayar TA 2024 terdiri dari 2 program dan 17 kegiatan dengan kebutuhan dana/pagu indikatif Perubahan sebesar Rp. 29.756.426.000.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan diatas maka ditetapkanlah program dan kegiatan nyata sehingga strategi yang telah ditetapkan dapat di implementasikan. Berikut Program kegiatan Sekretariat DPRD Kab.Kepulauan Selayar dalam kurun waktu 5 tahun ke depan :

6.1 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

6.1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Kota

a. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPASKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Admnistrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
- Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- Pemulangan Pegawai yang Pensiun
- Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
- Pemindahan Tugas ASN
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen instalasi listrik
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan bahan logistic kantor

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Fasilitas kunjungan tamu
- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- Dukungan Pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD

f. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

g. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h. Pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Perorangan
- Pemeliharaan mebel
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

i. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

- Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
- Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD

- Pelaksanaan Medical Chek Up DPRD

j. Layanan Administrasi DPRD

- Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD
- Fasilitasi Fraksi DPRD
- Fasilitasi Rapat
- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD

6.1.2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Fungsi DPRD

- a. Pembentukan Peraturan daerah
- b. Pembahasan kebijakan anggaran
- c. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan
- d. Peningkatan Kapasitas DPRD
- e. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi masyarakat
- f. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik
- g. Pembahasan kerja sama daerah
- h. Fasilitasi Tugas DPRD

BAB V

PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar TA 2024 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan selama satu tahun yang akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin terjadi pada saat Rencana Kerja dilaksanakan, dan sebagai tolak ukur akuntabilitas kinerja dengan mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kep. Selayar. Dalam satu tahun pelaksanaan Rencana Kerja TA 2024 akan terus dilakukan penyesuaian atas berbagai perubahan kebijakan/peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan tujuan sasaran dan tupoksi Sekretariat DPRD. Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan akan diadakan evaluasi dan dipertanggungjawabkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Bupati.

Untuk meningkatkan capaian kinerja di masa mendatang telah menetapkan beberapa kebijakan strategis yang perlu mendapat perhatian, antara lain dengan :

1. Peningkatan anggaran secara bertahap setiap tahun anggaran;
2. Pengadaan sarana prasarana fasilitasi Anggota Dewan DPRD Kab.Kep Selayar;
3. Penambahan kuantitas dan kualitas aparatur yang sesuai dengan bidang tugas

Demikian Rencana Kinerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024. Semoga Renja ini dapat berfungsi sebagai bahan masukan dalam menyusun dan menetapkan kebijakan pembangunan daerah pada tahun 2024.

Demikian untuk dilaksanakan.

Benteng, 2 Agustus 2024

SEKRETARIS DPRD

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



MASDAR J PRATAMA, S.Kom,MM

Pangkat : Pembina /IV.a

NIP. 19840602 20100 1 102

